



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/135 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun dokumen Perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2022


BUPATI PURBALINGGA,
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/135 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data
Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: <i>Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB</i> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangkat Penanggungjawab: Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah • Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Sasaran :		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	- Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga - Formulasi Pengukuran: <i>Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB</i> - Tipe Penghitungan : Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab: Inspektorat Daerah, BAPPELITBANGDA, Sekretariat Daerah - Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT/Tuhan YME serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Angka konflik sosial dan kriminalitas	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		- Formulasi Pengukuran: <u>Jumlah angka konflik sosial dan gangguan trantibum x per 10.000</u> Jumlah penduduk - Tipe Penghitungan : Non Komulatif - Perangda Penanggungjawab: Kesbangpol/Satpol PP - Sumber Data : Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya Pangan dan Papan secara layak

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	- Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini pilih karena menjadi permasalahan utama di Kabupaten Purbalingga - Formulasi Pengukuran: $PO = \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$ PO = Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Provertu Gap) Z = Garis Kemiskinan

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		q = Jumlah Penduduk Miskin Yi = Pendapatan Individu penduduk miskin N = jumlah penduduk • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Perangda Penanggungjawab: Bappelitbangda, DinsosdaldukP3A, DKPP, Dinrumkim • Sumber Data : BPS

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Manusia	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kualitas manusia yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup, Angka Melekat Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Pendapatan. Mengingat manusia merupakan subyek dan obyek dari pembangunan dan di Kabupaten Purbalingga menjadi Permasalahan Utama yang harus ditingkatkan. • Formulasi Pengukuran: $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Keterangan:

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		$X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup $X_{(2)}$ = Indeks Pendidikan = $\frac{2}{3}$ (<i>indeks melek huruf</i>) + $\frac{1}{3}$ (<i>indeks rata – rata lama sekolah</i>) $X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DinsosdaldukP3A • Sumber Data : BPS
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan gender pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mengingat IPG Purbalingga masih perlu ditingkatkan • Formulasi Pengukuran: $IDG = \frac{Ipar + IDM + (Lin - Dist))}{3}$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Penanggungjawab: DINSOSDALDUKKBP3A • Sumber Data : BPS

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	- Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengingat Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan. - Formulasi Pengukuran: $PDB_1 = PDB_0 (1 + R)^1$ Keterangan: PDB_1 = Produk Domestik Bruto Periode 1 PDB_0 = Produk Domestik Bruto Periode awal R = <i>Tingkat pertumbuhan</i> - Tipe Penghitungan : Non Kumulatif - Perangda Penanggungjawab: Bappelitbangda, Dinpertan, DKPP, DinkopUKM, Dinperindag, Dinporapar, Dinnaker, DPMPTSP - Sumber Data : BPS

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Sasaran 1 :		
Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	- Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah. - Formulasi Pengukuran: $\frac{PDRB}{Jumlah\ penduduk} \times 100\%$ - Tipe Penghitungan : Kumulatif - Perangda Penanggungjawab: Dinpertan, DKPP, DinkopUKM, Dinperindag, Dinporapar, Dinnaker, DPMPTSP - Sumber Data : BPS
Sasaran 2 :		
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan terhadap penurunan pengangguran yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		- Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ - Tipe Penghitungan : Non komulatif - Perangda Penanggungjawab: DINNAKER - Sumber Data : BPS

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	- Alasan Pemilihan Indikator : IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa - Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa}}$ - Tipe Penghitungan : Komulatif

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Perangda Penanggungjawab: Dinpermasdes • Sumber Data : Kementerian Desa PDT

Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	• Alasan Pemilihan Indikator : diisi Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi secara umum kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Indeks Jalan Mantap} + \text{Rasio Konektivitas}}{2}$ • Tipe Penghitungan : Komulatif • Perangda Penanggungjawab: DINHUB, DPU PR • Sumber Data : DINHUB, DPU PR

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	- Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan - Formulasi Pengukuran: IKLH : $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan: IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan - Tipe Penghitungan : Komulatif - Perangda Penanggungjawab: DLH - Sumber Data : DLH



BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: <i>Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB</i> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Inspektorat, Bappelitbangda, Sekretariat Daerah • Sumber Data : LHE SAKIP KemenPAN RB

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Tujuan 1 :		
Mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip – prinsip <i>good governance</i> melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Formulasi Pengukuran: <i>berdasarkan nilai assesment SPBE</i> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: DINKOMINFO • Sumber Data : LHE Kemen PAN RB
Sasaran 1 :		
Meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi publik	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik • Formulasi Pengukuran: Nilai (assesment dari Komisi Informasi Publik) Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Perangkat Penanggungjawab: DINKOMINFO • Dinkominfo Sumber Data : Komisi Informasi Publik/ KIP Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 2 :		
Meningkatnya ketersediaan data pada satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui ketersediaan Data yang diupload OPD pada Satu Data Daerah • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{OPD yang mengupload data}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Komulatif • Perangkat Penanggungjawab: DINKOMINFO • Sumber Data : OPD di Kabupaten Purbalingga
Sasaran 3 :		
Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat keamanan informasi daerah	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keamanan informasi daerah

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Formulasi Pengukuran: <i>Nilai assesment dari BSSN</i> • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Perangda Penanggungjawab: DINKOMINFO • Sumber Data : BSSN
Sasaran 4 :		
Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP DINKOMINFO Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Bobot}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Perangda Penanggungjawab: DINKOMINFO • Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab Kecamatan • Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga


BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI